

PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG SAAT PANDEMI COVID-19

Nidya Syifa Agna Munthe
NPP. 29.0151

*Asdaf Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email : [nidasyifa219p1@gmail.com](mailto:nidyasyifa219p1@gmail.com)

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP) : The effect of political communication on increasing public political participation, especially novice voters in the implementation of the Medan City Regional Head Election during the Covid-19 pandemic. **Purpose** : The purpose of this study is to analyze the strategy of the local government and the Medan City General Election Commission in carrying out a political approach, through political socialization to novice voters. **Method** : The research method used is a mix method with an inductive approach. **Results** : The results of the research related to the strategy of the Regional Government and the Medan City General Election Commission in increasing the participation of novice voters in the implementation of the Medan City Regional Head Election can be said to be adequate in terms of facilities, but not optimal in overall realization in the field. **Conclusion** : The participation of novice voters in the 2020 Medan City Election can be said to be quite high even though the level of participants has not met overall national standards, political socialization has been carried out as much as possible using mass media intermediaries, and also the Medan City KPU strategy in using the Election Smart House application.

Keywords : Political participation, novice voters, Regional Head Elections, Political Socialization during the Covid-19 Pandemic

ABSTRAK

Permasalahan : Pengaruh komunikasi politik terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan saat pandemi Covid-19. **Tujuan** : Maksud penelitian ini untuk menganalisis Strategi Pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam melakukan pendekatan politik, melalui sosialisasi politik kepada pemilih pemula. **Metode** : Metode penelitian yang digunakan adalah *mix method* dengan pendekatan induktif. **Hasil** : Hasil penelitian yang diperoleh terkait strategi Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan bisa dikatakan sudah memadai dari segi fasilitas, namun belum optimal secara keseluruhan dalam realisasi di lapangan. **Kesimpulan** : Partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pilkada Kota Medan tahun 2020 bisa dikatakan cukup tinggi walaupun tingkat partisipan belum memenuhi standar nasional secara keseluruhan, sosialisasi politik sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan menggunakan perantara media massa, dan juga strategi KPU Kota Medan dalam penggunaan aplikasi Rumah Pintar Pemilu.

Kata kunci : Partisipasi politik, Pemilih pemula, Pemilihan Kepala Daerah, Sosialisasi Politik di Masa Pandemi Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara mengaplikasikan sistem demokrasi dan terbuka dengan melaksanakan pemilihan umum sebagai suatu kewajiban untuk menjaga stabilitas sistem pemerintahan¹. Negara Indonesia melalui Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dengan kedaulatan yang dipegang penuh oleh masyarakat itu sendiri.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan tahun 2020 silam. Disaat pandemi Covid-19 masih menjadi wabah dengan eksistensi yang tinggi, terlihat dari jumlah partisipan yang belum memenuhi standar nasional yaitu 50% dari total DPT (Daftar pemilih tetap) yang sudah dia data oleh pihak KPPS yang berwenang. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pandemi yang menyebabkan mayoritas masyarakat enggan datang ke TPS (Tempat pemungutan Suara) dengan alasan mencegah penularan wabah virus Covid-19.

Selain itu terkait dengan sosialisasi politik oleh para pasangan calon, sebagai salah satu upaya untuk mengenalkan brand politik mereka sebagai calon kepala daerah yang akan memimpin daerah kekuasaannya. Berdasarkan survey lapangan ke 2 (dua) sekolah yang menjadi salah satu lokasi penelitian, tidak sedikit responden yang menyatakan bahwa mereka pribadi tidak mengenal dengan baik sosok calon kepala daerah yang akan dipilih berdasarkan sosialisasi politik dengan berbagai media yang telah dilakukan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang berjudul “Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Medan Tahun 2020 Di Kecamatan Medan Selayang”. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, survei terbuka, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini idrangkum dalam 4 (empat) poin, yaitu kinerja pasangan calon dinilai kurang, partisipasi masyarakat rendah, kurangnya sosialisasi politiiik, dan angka penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditinjau Dari Konsep Maslahat”. Penelitian ini menggunakan konsep penilaian menggunakan Metode Library research. Hasil dari penelitian ini ialah perbandingan manfaat dari Pilkada yang dinilai sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem pemerintahan tetapi menjadi salah satu penyebab terjadinya *cluster Covid-19*. Penelitian yang berjudul “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelituian ini berupa pernyataan bahwa pemilihan langsung tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan seperti pembelian surat suara pada pelaksanaan pemilihan. Sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang- undang nomor 10 tahun 2008 yang menyatakan bahwa untuk mencalonkan dan menjadikan kepala daerah memerlukan

biaya yang sangat besar, sehingga begitu terpilih dan berkuasa, terjebak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, manipulasi, bahkan KKN. Hal ini menjadi faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak korupsi, hal ini biasanya dimulai dari skala kecil yang semakin lama akan menjadi tindakan berskala besar.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni tentang Partisipasi pemilih pemula pada Pilkada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 dengan lokus Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dengan media pengisian kuesioner oleh beberapa responden yang telah ditetapkan jumlahnya dengan teknik “*quota sampling*”. *Penilaian tinggi rendahnya penilaian pada partisipasi pemilih pemula* juga dikaitkan dengan intensitas sosialisasi politik oleh Pemerintah daerah, KPU Kota Medan, dan pasangan calon yang ingin mengenalkan brand politik mereka.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pilkada Kota Medan tahun 2020 di saat pandemi Covid-19, dikaitkan dengan strategi pemerintah dan KPU Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula di saat dengan pemanfaatan media massa dalam melakukan sosialisasi ataupun kampanye politik dari pasangan calon.

II. METODE

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian dengan metode “*mix method*”, yaitu perpaduan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan induktif. Peneliti mengumpulkan data dengan peneliti ingin meneliti dengan menganalisis fakta yang ada di lapangan atau lokasi penelitian, dengan bermula dari data awal sebuah pengamatan fenomena yang sedang dikaji mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota Medan tahun 2020. Korelasi teori yang digunakan ialah teori Partisipasi politik oleh Rush dan Althoff dan teori Komunikasi politik persuasif oleh Litteljhon yang menjadi dasar pembuktian pada saat penelitian di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

➤ Partisipasi pemilih pemula pada kegiatan pemilihan

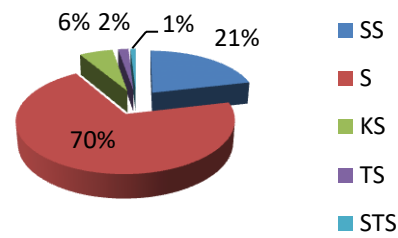
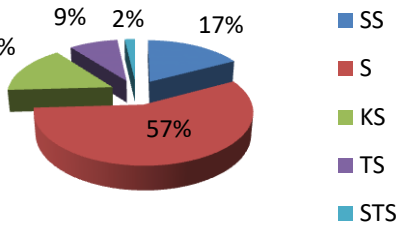
Berdasarkan teori yang digunakan, peneliti menetapkan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai keikutsertaan pemilih pemula bila terdapat kegiatan pemilihan, baik itu Pemilu maupun Pilkada.

Pertanyaan	Pilihan Responden										
Bagaimana pandangan saudara terhadap pernyataan “perubahan tidak memerlukan pemilihan” bila dikaitkan dengan pemilihan calon kepala daerah	<table border="1"> <tr><th>Pilihan</th><th>Persentase</th></tr> <tr><td>SS</td><td>7%</td></tr> <tr><td>S</td><td>26%</td></tr> <tr><td>KS</td><td>28%</td></tr> <tr><td>TS</td><td>28%</td></tr> </table>	Pilihan	Persentase	SS	7%	S	26%	KS	28%	TS	28%
Pilihan	Persentase										
SS	7%										
S	26%										
KS	28%										
TS	28%										
Pemilih pemula dikategorikan dengan usia genap 17 tahun, seandainya anda berusia tersebut makan anda akan menggunakan hak pilih dalam Pilkada ataupun Pemilu	<table border="1"> <tr><th>Pilihan</th><th>Persentase</th></tr> <tr><td>SS</td><td>42%</td></tr> <tr><td>S</td><td>54%</td></tr> <tr><td>KS</td><td>3%</td></tr> <tr><td>TS</td><td>1%</td></tr> </table>	Pilihan	Persentase	SS	42%	S	54%	KS	3%	TS	1%
Pilihan	Persentase										
SS	42%										
S	54%										
KS	3%										
TS	1%										

➤ **Peran Pemerintah Daerah dan KPU Kota Medan dalam Pemilihan di masa pandemi Covid-19**

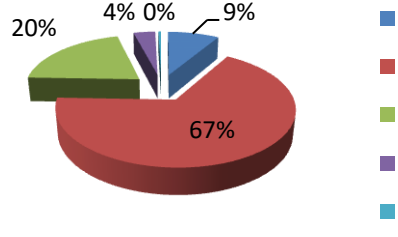
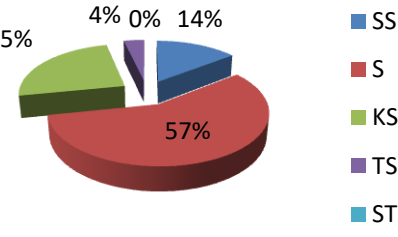
Terkait dengan peran pemerintah Daerah dan KPU Kota Medan dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020 silam, akan diwakilkan dengan beberapa pertanyaan pendukung dari pembahasan pada penelitian ini. Seperti sistematika pelaksanaan pemilihan hingga sosialisasi mengenai patuh prokes ketika pencoblosan di TPS.

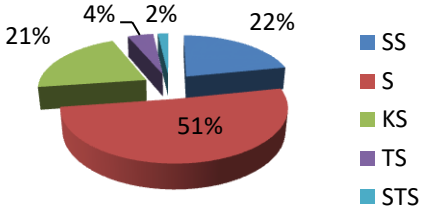
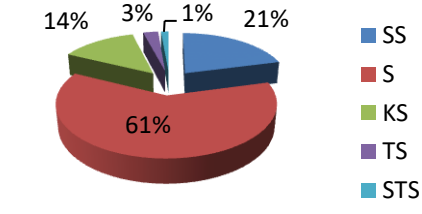
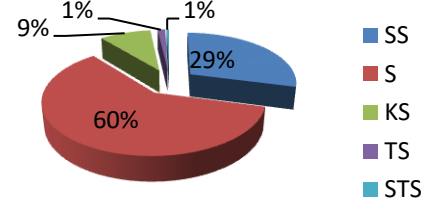
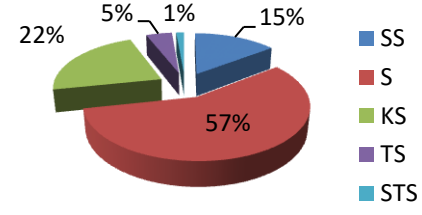
Pertanyaan	Hasil Responden												
Adanya pengadaan pendataan oleh kelurahan masing-masing melalui hasil sensus penduduk dalam menentukan jumlah pembagian surat suara	<table border="1"> <tr><th>Pilihan</th><th>Persentase</th></tr> <tr><td>SS</td><td>21%</td></tr> <tr><td>S</td><td>70%</td></tr> <tr><td>KS</td><td>6%</td></tr> <tr><td>TS</td><td>2%</td></tr> </table>	Pilihan	Persentase	SS	21%	S	70%	KS	6%	TS	2%		
Pilihan	Persentase												
SS	21%												
S	70%												
KS	6%												
TS	2%												
Penjelasan sistematika pelaksanaan dan pencoblosan yang baik dan benar telah disampaikan oleh perangkat daerah setempat	<table border="1"> <tr><th>Pilihan</th><th>Persentase</th></tr> <tr><td>SS</td><td>21%</td></tr> <tr><td>S</td><td>70%</td></tr> <tr><td>KS</td><td>6%</td></tr> <tr><td>TS</td><td>2%</td></tr> <tr><td>STS</td><td>1%</td></tr> </table>	Pilihan	Persentase	SS	21%	S	70%	KS	6%	TS	2%	STS	1%
Pilihan	Persentase												
SS	21%												
S	70%												
KS	6%												
TS	2%												
STS	1%												

<p>Masih terdapat kesalahan administrasi dalam pendataan surat suara yang akan dibagikan</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SS</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>KS</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>STS</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Persentase	SS	21%	S	70%	KS	6%	TS	2%	STS	1%
Kategori	Persentase												
SS	21%												
S	70%												
KS	6%												
TS	2%												
STS	1%												
<p>Kurangnya sosialisasi dan penanganan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemilihan bila terganggu oleh bencana non-alam (seperti covid-19) pada Pilkada sebelumnya</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SS</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>57%</td> </tr> <tr> <td>KS</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>STS</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Persentase	SS	17%	S	57%	KS	15%	TS	9%	STS	2%
Kategori	Persentase												
SS	17%												
S	57%												
KS	15%												
TS	9%												
STS	2%												

➤ **Pemanfaatan Media Sosial dalam Sosialisasi Politik**

Adapun pemanfaatan media sosial dalam sosialisasi politik, bisa diukur dengan melihat *feedback* yang diberikan masyarakat dan tingkat pemahaman dari informasi yang diberikan. Tingkat pemahaman informasi menjadi tolak ukur keberhasilan penyampaian pesan politik yang disampaikan pasangan calon kepada masyarakat di daerah pimpinannya.

Pertanyaan	Pilihan Responden												
<p>Pengenalan politik dengan sosialisasi kepada masyarakat sudah sesuai aturan dan dilaksanakan dengan baik</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SS</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>67%</td> </tr> <tr> <td>KS</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>STS</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Persentase	SS	9%	S	67%	KS	20%	TS	4%	STS	0%
Kategori	Persentase												
SS	9%												
S	67%												
KS	20%												
TS	4%												
STS	0%												
<p>Sosialisasi juga sudah dilaksanakan oleh Lurah ataupun perangkat daerah masing-masing di wilayah tempat tinggal saudara</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SS</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>57%</td> </tr> <tr> <td>KS</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>STS</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Persentase	SS	14%	S	57%	KS	25%	TS	4%	STS	0%
Kategori	Persentase												
SS	14%												
S	57%												
KS	25%												
TS	4%												
STS	0%												

<p>Penggunaan media massa (<i>online</i>) pada saat kampanye politik oleh pasangan calon dengan partai pendukung merupakan opsi yang terbaik untuk dilakukan sewaktu pemilihan di masa pandemi covid-19</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SS</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>51%</td> </tr> <tr> <td>KS</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>STS</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Persentase	SS	22%	S	51%	KS	21%	TS	4%	STS	2%
Kategori	Persentase												
SS	22%												
S	51%												
KS	21%												
TS	4%												
STS	2%												
<p>Pesan politik lebih mudah untuk sampai kepada seluruh lapisan masyarakat bila menggunakan bantuan media massa</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SS</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>61%</td> </tr> <tr> <td>KS</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>STS</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Persentase	SS	21%	S	61%	KS	14%	TS	3%	STS	1%
Kategori	Persentase												
SS	21%												
S	61%												
KS	14%												
TS	3%												
STS	1%												
<p>Para pasangan calon bersama dengan partai pendukung mengenalkan diri mereka secara baik dan terbuka kepada masyarakat</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SS</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>KS</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>STS</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Persentase	SS	29%	S	60%	KS	9%	TS	1%	STS	1%
Kategori	Persentase												
SS	29%												
S	60%												
KS	9%												
TS	1%												
STS	1%												
<p>Saudara pribadi mengenal dengan baik bagaimana kinerja dan kepribadian pasangan calon yang maju pada pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SS</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>57%</td> </tr> <tr> <td>KS</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>STS</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Persentase	SS	15%	S	57%	KS	22%	TS	5%	STS	1%
Kategori	Persentase												
SS	15%												
S	57%												
KS	22%												
TS	5%												
STS	1%												

B. Pembahasan

➤ Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pelaksanaan Pilkada Kota Medan Pada Tahun 2020 Dinilai Cukup Tinggi

Hasil analisa dari pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang terkait, mengemukakan bahwa partisipan dalam kategori pemilih pemula pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Periode 2021-2024 bisa dikatakan cukup tinggi dan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya yaitu pada Tahun 2015 lalu. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya partisipan pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan suatu alasan.

Kepentingan politik dengan adanya pelaksanaan Pilkada masih sangat diperlukan dan menjadi point penting dalam dunia birokrasi, kebutuhan akan pemilihan yang bertujuan untuk berjalannya suatu roda pemerintahan dengan pola dan sistem yang teratur. Dimana hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kuesioner :

Pertanyaan 1 : Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar, mayoritas responden memilih jawaban “kurang setuju dan tidak setuju” pada pilihan jawaban yang disediakan. Walaupun untuk jawaban “sangat setuju dan setuju” juga tidak memiliki angka yang kecil. Hal ini juga bisa digambarkan sebagai bentuk pandangan masyarakat yang beragam sesuai dengan perhatiannya kepada pelaksanaan pemilihan, baik itu Pemilu ataupun Pilkada. Faktor penyebab bedanya pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan ialah rasa tidak percaya kepada pemimpin yang terpilih sebelumnya dan harapan lebih kepada pasangan calon yang mencalonkan diri di pemilihan selanjutnya yang dianggap bisa membawa masyarakat dan daerah pimpinannya ke arah yang lebih baik.

Pertanyaan 2 : Pertanyaan kedua yang lebih berfokus kepada partisipasi pemilih pemula pada saat pelaksanaan pemilihan, mayoritas responden memilih jawaban “setuju” dimana ini dapat dikatakan sebagai gambaran keterlibatan mereka bila adanya pelaksanaan kegiatan pemilihan, pemuda dengan usia genap 17 tahun sangat bersedia menggunakan suaranya dan bertanggung jawab atas hak pilih yang dimilikinya bila terdapat pelaksanaan kegiatan pemilihan.

Pernyataan tersebut didukung juga oleh survei partisipasi politik pemilih oleh KPU Kota Medan dimana survei partisipasi politik pemilih pada Pilkada Serentak Kota Medan 2020 yang dilakukan KPU Kota Medan ini menunjukkan tidak adanya perbedaan dengan hasil real count KPU Kota Medan.

Secara umum, tingkat partisipasi politik yang diperoleh adalah sebesar 46.5%. Jika ditinjau dari usia, partisipasi pemilih pemula di Kota Medan pada Pilkada Serentak Walikota/Wakil Walikota masih sangat rendah, yakni 30.8%. Partisipasi pemilih berusia 20 s/d 60 tahun, selain itu, juga hanya berkisar 37 s/d 54%. Rekapitulasi dari partisipian Pilkada Kota Medan Pada Tahun 2020 silam digambarkan pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Rekapitulasi Penggunaan Hak Pilih Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020 Berdasarkan Umur

Keberagaman Usia	Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada 9 Desember 2020		Total
	Ya	Tidak	
15-19 tahun	30.8%	69.2%	100.0%
20-24 tahun	50.0%	50.0%	100.0%
25-29 tahun	37.0%	63.0%	100.0%
30-34 tahun	45.2%	54.8%	100.0%
35-39 tahun	41.5%	58.5%	100.0%
40-44 tahun	51.0%	49.0%	100.0%

45-49 tahun	53.7%	46.3%	100.0%
50-54 tahun	50.0%	50.0%	100.0%
55-59 tahun	40.0%	60.0%	100.0%
60-64 tahun	61.5%	38.5%	100.0%
65-69 tahun	35.0%	65.0%	100.0%
70-74 tahun	71.4%	28.6%	100.0%
>75 tahun	33.3%	66.7%	100.0%
Total	46.5%	53.5%	100.0%

Sumber : diolah peneliti, 2022

Tingkat partisipasi pemilih pemula cukup tinggi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi kelompok usia lansia. Kelompok usia lansia mengalami kejenuhan untuk berpartisipasi dalam pemilihan Walikota/Walikota Medan dikarenakan tidak adanya perubahan signifikan di Kota Medan pasca terpilihnya walikota-walikota sebelumnya.

Sangat berbeda dengan kelompok pemilih pemula yang pada umumnya cukup antusias untuk ikut serta dalam pemilihan Walikota/Wakil Walikota Medan. Kelompok usia ini masih memiliki kebanggaan untuk ikut serta berpartisipasi, baik sebagai pemilih hingga menjadi tim sukses. Akan tetapi tetap ada kelompok pemilih muda yang cenderung apatis dengan dengan kegiatan pemilihan dikarenakan mereka tidak percaya bahwa hasil akhir proses politik yang berlangsung dapat membawa perubahan di masyarakat. (Hasil FGD dengan PPK, PPS dan Relawan Demokrasi KPU Kota Medan).

➤ **Strategi Pemerintah Daerah Dan KPU Kota Medan Dalam Menyelenggarakan Pilkada Kota Medan Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 dinilai cukup optimal**

Adanya pandemi Covid-19 menjadi tugas tambahan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak hanya penyusunan rancangan pencegahan, pemulihan, juga pengobatan jangka panjang yang menjadi perhatian tambahan untuk segera diselesaikan. Realisasi lapnagan dalam hal persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Dearha Kota Medan Tahun 2020 silami menjadi salah satu gambaran tindakan pemerintah yang melakukan protokol kesehatan selama proses pemilihan berlangsung hingga selesai pada tahap perhitungan suara. Adapun peneliti menggunakan metode wawancara dan penyebaran kuesioner sebagai alat bantu untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian

Pelaksanaan kegiatan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan pada tahun 2020 memiliki rangkaian kegiatan yang sama seperti pemilihan pada umumnya. Yang menjadi

perhatian adalah kondisi pandemi Covid-19 yang pada saat itu mempengaruhi sistematika pelaksanaan tahapan Pilkada tersebut.

Diawali dengan persiapan pemilihan untuk penyebaran logistik berupa spanduk dan pemasangan iklan di daerah kampanye sebagai bentuk sosialisasi politik. Sosialisasi ini dilakukan untuk mengenalkan para pasangan calon kepala daerah kepada masyarakat sekitar dalam bentuk penyampaian visi misi, partai politik yang mengusungnya, juga kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan kedepannya bila ia terpilih untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah. Sosialisasi politik di Kecamatan Medan Tembung dilakukan dengan 3 cara, *pertama*, sosialisasi dengan sistem *door to door*. *Kedua*, menggunakan sistem halo-halo (patroli mobil dan motor) dan *ketiga*, melalui media massa (banner dan iklan).

Sistem *door to door* dilakukan dengan sosialisasi ke beberapa rumah warga dan tempat-tempat strategis oleh para relawan dan aktivis politik. Sedangkan sistem halo-halo merupakan sosialisasi menggunakan patroli mobil atau kereta yang disampaikan melalui *speaker* dan toa di beberapa titik pemukiman masyarakat. Adapun sosialisasi melalui media massa bisa disaksikan langsung di lapangan seperti pemasangan spanduk maupun banner, juga bisa dilihat dari iklan-iklan kampanye yang ada di media elektronik seperti Tv dan internet.

Perbedaan dari ketiga sistem sosialisasi diatas hanyalah media penyalur informasi mengenai Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk pendekatan politik kepada masyarakat. Inti dari sosialisasi yang dilakukan adalah untuk mengajak para warga untuk datang ke TPS (Tempat pemungutan suara), menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, penjelasan sistematika pencoblosan, serta mengenalkan para pasangan calon yang akan dipilih ketika kegiatan pemilihan berlangsung.

Kuesioner :

Pertanyaan 1 : Adanya tanggungjawab pemerintah dalam memfasilitasi pendataan masyarakat untuk pendistribusian surat suara. Pendataan harus melalui tahapan sinkronisasi data dengan rekam data terbaru yang ada di kelurahan dengan bagian Dukcapil di kecamatan.

Pertanyaan 2 : Penugasan Linmas dan PPS (Panitia pemungutan suara) untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat mengenai dokumen wajib yang harus dibawa ke TPS, sistematika pencoblosan, tata cara perhitungan surat suara hingga proses penandatanganan oleh saksi terhadap hasil perhitungan surat suara.

Pertanyaan 3 : Dalam pendataan penerima surat suara masih ditemukan kesalahan di bagian administrasi pendataan, seperti pemilih tidak terdaftar di DPT (Daftar pemilih tetap) manapun. Salah satu penyebabnya adalah adanya pendatang baru yang tidak melapor untuk pengurusan KTP (Kartu tanda penduduk) dan juga surat pindah dari lingkungan tersebut. Dimana sistem di Indonesia masih belum bisa di input secara otomatis tanpa adanya laporan kedatangan dan kepindahan dari pihak yang bersangkutan.

Pertanyaan 4 : Persetujuan dari pihak masyarakat yang dalam hal ini pemilih pemula yang setuju dengan anggapan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19. Seperti pemberlakuan prokes dan penggunaan APD oleh petugas, panitia pemungutan suara, dan pengawas pelaksana kegiatan yang belum diterapkan dengan standar yang sama di setiap TPS.

➤ **Penggunaan Media Massa Oleh Pemerintah Daerah Dan KPU Kota Medan Dalam Hal Sosialisasi Politik Kepada Masyarakat Khususnya Pemilih Pemula**

Sosialisasi politik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan media sosial untuk memperluas penyebaran informasi membawa dampak positif bagi pemerintah. Kemudahan distribusi informasi yang memiliki banyak kelebihan, seperti efisiensi waktu dan hanya membutuhkan beberapa orang dalam pengerjaannya. Adapun peneliti menggunakan metode wawancara dan penyebaran kuesioner sebagai alat bantu untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan memiliki website dan aplikasi pendukung dalam mengenalkan sejarah dan sistematika pemilihan, aplikasi ini bernama RPP (rumah pintar Pemilu). Konsep dari RPP itu sendiri merupakan pendidikan pemilih yang memanfaatkan ruang khusus dari suatu bangunan untuk melakukan program-program dan project edukasi masyarakat. Materi edukasi yang diberikan memiliki sistematika yang terperinci dan memuat sarana untuk memperkenalkan, memahamkan, menanamkan kesadaran dan menginspirasi masyarakat terhadap pentingnya nilai nilai demokrasi.

Pihak KPU Kota Medan juga sering melakukan sosialisasi ke beberapa SMP (sekolah menengah pertama) dan SMA (sekolah menengah awal) di Kota Medan dan memberikan contoh lapangan ketika ada kegiatan pemilihan ketua osis, ketua instansi sekolah, dan pemilihan lainnya. Hal ini memiliki tujuan agar siswa dan siswi bisa memahami bagaimana cara memilih dengan baik dan benar.

Kuesioner :

Mengenai pertanyaan yang menjelaskan indikator sosialisasi politik dan brand pemimpin politik, peneliti mengambil 5 pertanyaan dari kuesioner yang disebar yang berkaitan dengan indikator tersebut. Secara garis besar sosialisasi politik bisa kita tinjau dari tindakan dan gerakan aparat pemerintah desa maupun kelurahan yang bertugas ataupun pengaruh di bagian penyebaran logistik juga pada bagian humas.

Sedangkan untuk brand pemimpin politik diukur dari kampanye yang dilakukan di media massa, apakah sudah semua masyarakat mengenal siapa pasangan calon, visi misi dan janji pada saatn kampanye, dan nomor urut pasangan calon yang akan di coblos.

Pertanyaan 1 : Sosialisasi yang dilakukan untuk pengenalan pasangan calon secara umum bisa dikatakan sudah baik, pernyataan ini merujuk pada hasil kuesioner yang hampir sebagian besar memilih setuju bahwa mereka menerima penyampaian informasi pada saat kampanye berlangsung. Namun, responden yang mengisi “kurang setuju” juga tidak memiliki nilai yang rendah, hal ini dapat disimpulkan bahwa walaupun penyampaian sosialisasi dilakukan dengan baik dan dapat dipahami masyarakat namun belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui pesan kampanye dan siapa pasangan calon yang akan dipilih di TPS nantinya.

Pertanyaan 2 : Penggunaan media massa juga sudah dilakukan sebelumnya walaupun tidak ada pandemi Covid-19 yang menjadi kendala pada Pulkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan tahun 2020. Adanya edaran untuk menaati prokes dan social distancing mendorong kebijakan kampanye sebaiknya dilakukan secara online daripada kampanye yang dilaksanakan langsung di lapangan.

Hal ini dilakukan selain mencegah terjadinya kluster Covid-19 juga sebagai salah satu alasan agar pesan politik dapat disampaikan secara menyeluruh, mengingta masyarakat lebih sering menggunakan media sosial di kehidupan sehari-harinya sehingga besar kemungkinan untuk dilihat di media massa seperti iklan, konten di Video Youtube, website, dan lainnya.

Pertanyaan 3 : Adanya perbandingan yang dilihat dengan indikator penggunaan media massa dalam penyampaian pesan politik dan pendekatan politik kepada masyarakat, harapan bahwa penyampaian yang dilakukan bisa lebih dipahami dan sangat sesuai untuk diterapkan di masa pandemi Covid-19. Penggunaan media massa dalam penyampaian kampanye pasangan calon juga bisa dikatakan efektif dan efisien dikarenakan bisa merangkum semua pesan dan kampanye pasangan calon di satu tempat sehingga mempermudah masyarakat untuk mengenal pasangan calon secara keseluruhan tanpa harus berpindah tempat bila dilakukan dengan cara tatap muka.

Pertanyaan 4 : Indikator yang merujuk pada pertanyaan ini ialah brand pemimpin politik, bagaimana caranya agar pemimpin bisa menarik *interest* masyarakat agar mempercayakan suaranya untuk memilih kepala daerah yang dianggap mampu membawa daerah dan masyarakat pimpinannya ke arah yang lebih baik dan tetap menjaga stabilitas yang ada. Keterbukaan pemimpin kepada bawahannya dan juga masyarakatnya merupakan bentuk adanya kepedulian dan interaksi yang intens sehingga terbentuk hubungan yang harmonis dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kesenjangan antara pemimpin dan orang-orang disekitarnya dapat berkurang sebagaimana mestinya.

Keterbukaan dan fleksibilitas yang terbentuk akan memudahkan urusan pemerintahan yang mengelola sistem yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu pelayanan, pembinaan, bahkan pemenuhan kesejahteraan masyarakat di bawah pimpinannya. Keterbukaan juga mendorong masyarakat untuk peduli kepada hak dan kewajiban yang diemban untuk

dilaksanakan sebaik-baiknya dan pihak pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan wadah aspirasi masyarakat sehingga terciptanya koordinasi yang baik sebagai awal mula pembentukan pemerintahan yang sesuai dengan harapan semua orang.

Pertanyaan 5 : Sebelum memilih kita seharusnya tau siapa sosok yang akan dipilih dan bagaimana kinerjanya sebelum ia mencalonkan dirinya, mayoritas masyarakat tidak memiliki rasa inisiatif untuk mencari tahu latar belakang pemimpinnya. Disinilah pasangan calon memiliki peran penting ketika berkampanye untuk mengenalkan dirinya sebagai sosok pemimpin yang pantas untuk dipilih sebagai pemimpin daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Namun hasil dari kuesioner menunjukkan pilihan kurang setuju pada pertanyaan yang bisa dikatakan perlu menjadi perhatian lebih lanjut dikarenakan ini menyatakan bahwa masih ada beberapa pasangan calon yang belum melakukan interaksi yang baik pada masyarakatnya. Seperti penjelasan pada indikator sosialisasi dan pendidikan politik sangat penting untuk dilakukan sebaik mungkin karena kepercayaan dapat dibangun bila ada keterbukaan yang mendasarinya.

C. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah pusat maupun daerah. Pendidikan politik pada umumnya didapatkan sejak dini melalui pendidikan di bangku sekolah, yang pada dasarnya tetap membutuhkan pengaruh dari lingkungan luar dan bimbingan orang tua. Hal ini menjadi dasar dalam pembentukan prinsip politik yang kuat. Pengumpulan data dengan menggunakan pengisian kuesioner juga menjadi acuan peneliti dalam menggambarkan situasi disaat seorang pemilih pemula menggunakan hak pilihnya dalam memilih kepala daerah yang dianggap cocok untuk memimpin. Dengan lokus penelitian di Kecamatan Medan tembung, yang notabenenay menjadi salah satu kecamatan yang memiliki partisipasi pemilih yang cukup tinggi dengan luas daerah yang tidak sebesar kecamatan lain menjadi tuntutan peneliti dalam menentukan informan yang akan menjadi narasumber.

IV. KESIMPULAN

- Hasil dari pengumpulan data dan penelitian terhadap strategi Pemerintah daerah dan KPU Kota Medan membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang berpartisipasi dengan tetap menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Terbukti dengan besarnya harapan masyarakat terhadap pemimpinnya untuk membawa perubahan dalam 5 tahun masa jabatannya. Terkhusus kecamatan Medan Tembung dengan subjek partisipasi pemilih pemula masih di angka yang tinggi dan dapat lebih diarahkan untuk membentuk fondasi politik yang kuat.

Adapun 3 (tiga) tujuan penelitian ini dilakukan, tercapai dengan kelebihannya

- a. pemilih pemula, berdasarkan pengamatan peneliti di dua sekolah yang menjadi lokus penelitian. Peneliti melihat bahwa semangat peduli dan ingin berpartisipasi pada politik yang dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah baik itu Pemilu ataupun Pilkada harus diarahkan sebaik mungkin, karena bila terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi dan pengenalan pada politik bisa menjadi boomerang ketidakpercayaan mereka sebagai pemilih pemula untuk ingin bertanggungjawab pada hak pilihnya.
- b. Tujuan kedua, merupakan penilaian terhadap strategi pemerintah daerah dan KPU Kota Medan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan. Gambaran pelaksanaan pemilihan yang dijelaskan oleh ketua KPPS Kecamatan Medan Tembung, mendeskripsikan beberapa aturan yang diberlakukan ketika pemilihan berlangsung.

Adapun beberapa kebijakan yang diberlakukan ketika pemilihan di saat pandemi Covid-19 dalam upaya pencegahan *Cluster Covid* diantaranya :

- Pemberlakuan wajib tes antigen dan SWAB bagi anggota PPS (Panitia pemungutan suara) ataupun panitia pelaksana yang bertugas pada saat pemilihan.
 - Pengecekan suhu dan wajib mencuci tangan di tempat yang telah disediakan di bagian luare TPS.
 - Sterilisasi bilik pencoblosan secara berkala, serta tindakan penanganan bila terdapat partisipan yang terindikasi gejala Covid-19.
- c. Tujuan Ketiga, berupa penerapan media massa dalam penyampaian informasi dan media sosialisasi politik kepada masyarakat khususnya pemilih pemula harus lebih ditingkatkan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pendidikan politik yang diperlukan agar tidak ada kesalahpahaman dalam memandang sistem dan pola kegiatan politik pemerintahan.

➤ **Keterbatasan Penelitian**

Hal ini diminimalisir sekecil mungkin karena memiliki referensi dari literasi-literasi pendukung yang dimiliki oleh peneliti, selain itu penelitian juga memiliki fokus utama tentang pemilih pemula yang menjadikan skala penelitian terfokus pada satu hal. terdapat pada waktu dan biaya. Selain itu penelitian juga hanya fokus pada satu lokasi saja, yakni Pasar Serasi padahal ada beberapa pasar dan tempat yang memiliki permasalahan yang sama tentang PKL. Namun yang menjadi kendala kecil ialah waktu yang sangat terbatas ketika pengumpulan informasi.

➤ Arah Masa Depan Penelitian

Peneliti menyadari masih menjadi minoritas penelitian yang bertajuk pada pemilih pemula dan hanya berfokus pada skala di beberapa kecamatan bahkan kota-kota tertentu yang menjadi awal penelitian dilakukan, oleh karena itu peneliti menyarankan adanya penelitian lanjutan dengan objek penelitian berupa pemilih pemula sebagai partisipan dalam Pemilu ataupun Pilkada.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih terutama kepada Ketua KPU Kota Medan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang membantu pada saat pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Althoff, Rush and Philip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT. raja Grafindo kencana, 2010)
- Creswell, John W., *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th Edition*, ed. by Vicki Knight, 4th edn (London: AGE publication), CXLVIII
- Damsar, Dr., *Pengantar Sosiologi Politik*, 4th edn (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012), CXLVIII
- Lubis, Fritz Yoel Lewis, 'Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Medan Tahun 2020 Di Kecamatan Medan Selayang', 7 (2021), 6
- Moys, Redman an, 'Continue Research Methods in the Social Sciences 7th Edition Pdf', *Research Ethods in the Social Sciences*, 7 (2016), 3
- Pardede, Marulak, 'Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.1 (2014), 85 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>>
- Rahman, Asmika, 'Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan', *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.1 (2018), 44 <<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385>>
- Rahmawati, Devi Layalin, 'Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditinjau Dari Konsep Maslahat Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah', 2021, 63